

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan menjadi permasalahan yang sering diperbincangkan di berbagai negara di dunia. Masalahnya, janji pembangunan yang telah lama diharapkan sejak beberapa dekade lalu berjalan lambat, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Konsep pembangunan juga telah bergeser seiring dengan perkembangan jaman, dimana indikator pembangunan tidak lagi mengacu pada pembangunan ekonomi saja tetapi juga telah merambah pada bidang yang lain seperti lingkungan, populasi, kelaparan, wanita, habitat atau pekerjaan, dan mengacu pada pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdamaian), dan 5) Partnership (kerjasama)¹. Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

Indonesia sebagai negara agraris menempatkan pertanian sebagai salah satu komoditas yang memiliki pengaruh dalam sebuah pembangunan berkelanjutan. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target dan tujuan pada Program Sustainable Development Goals (SDGs), dimana hal ini telah dijelaskan dalam Tujuan SDGs nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian, selain itu pertanian juga menjadi bagian dari sebuah agenda prioritas

¹ Hardiana, D. R. (2018). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan di Jakarta

atau Nawacita yang ke-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional dimana pengembangan sektor pertanian menjadi salah satu sarana untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi sub-agenda prioritas dalam Nawacita yang ke-6². Kebijakan pemerintah yang efektif akan mampu meningkatkan daya saing sector pertanian. Apalagi ditengah perdagangan bebas ASEAN dan perdagangan bebas dunia, kebijakan pemerintah akan menentukan posisi sektor ini dalam persaingan global.

Sektor pertanian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 akan diarahkan untuk tujuan nasional, yaitu menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil, dan makmur. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Selain hal itu, pertanian juga menjadi salah satu pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan strategi yang tepat agar pemanfaatan bisa berjalan secara optimal serta dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Disisi lain, luas lahan pertanian yang semakin sempit digilas oleh lahan perumahan dan lahan industri serta jumlah penduduk yang semakin tinggi berdampak terhadap sulitnya pemenuhan komoditas pangan khususnya dan kehidupan generasi yang akan datang pada umumnya. Oleh karena itu, masalah pertanian menjadi sangat kompleks karena berkaitan dengan hajat hidup

² Wedhaswary, I. D. (2014, April 16). "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK.

masyarakat sekarang dan yang akan datang³ (Syamsuadi, Hartati, Trisnawati, & Arisandi, 2020)

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara atau suatu daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a). Adanya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), b). Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja, c). Adanya kemampuan dari sektor pertanian dalam menyediakan keragaman menu makanan yang nantinya sangat memengaruhi pola konsumsi dan gizi masyarakat, d). Sektor pertanian mampu mendukung perkembangan industri hulu dan industri hilir, dan e). Dengan kegiatan ekspor yang dilakukan berdasarkan hasil pertanian, akan mampu memberikan sumbangan devisa bagi negara. Sektor pertanian merupakan faktor yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai kehidupan sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahkan menjadi pusat pengaman pada krisis ekonomi Indonesia.

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia, bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian. Potensi dan kekayaan yang berlimpah serta tanah yang subur yang dimiliki negara kita sangat memungkinkan untuk pengembangan pertanian. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreatifitas dan aktivitas dikalangan masyarakat. Alasan menempatkan sektor pertanian pada

³ Syamsuadi, A., Hartati, S., Trisnawati, L., & Arisandi, D. (2020). Strategi kebijakan pengembangan sagu berbasis sentra industri kecil menengah (ikm). *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 114–128

skala prioritas utama yaitu, sebagian besar penduduk bekerja disektor pertanian yang merupakan golongan berpendapatan rendah.

Semula industrialisasi adalah sektor yang diandalkan sebagai suatu model pembangunan yang akan mampu memecahkan masalah keterbelakangan negara-negara yang sedang berkembang. Akan tetapi, setelah terjadinya krisis, justru pembangunan sektor pertanian menjadi harapan baru dalam pembangunan di negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa diungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi penting dalam proses pembangunan, yaitu: 1. Sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang diperlukan sebagai input sektor lain, terutama sektor industri, seperti: industri tekstil, industri makanan dan minuman; 2. Sebagai negara agraris (kondisi historis) maka sektor pertanian menjadi sektor yang sangat kuat dalam perekonomian dalam tahap awal proses pembangunan. Populasi di sektor pertanian (pedesaan) membentuk suatu proporsi yang sangat besar. Hal ini menjadi pasar yang sangat besar bagi produk-produk dalam negeri baik untuk barang produksi maupun barang konsumsi, terutama produk pangan. Sejalan dengan itu, ketahanan pangan yang terjamin merupakan prasyarat kestabilan sosial dan politik; 3. Karena terjadi transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri maka sektor pertanian menjadi sektor penyedia faktor produksi (terutama tenaga kerja) yang besar bagi sektor non-pertanian (industri). 4. Sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif dibanding bangsa lain⁴. Proses pembangunan yang ideal mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif terhadap bangsa lain, baik untuk kepentingan ekspor maupun substitusi impor.

Meskipun Indonesia adalah negara agraris, tetapi tidak banyak yang mampu mengolah hasil pertanian terutama hasil dari panen jagung. Salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan dan dibenahi dalam pengembangan hasil

⁴ Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2016). Analisis Peran Sektor Pertanian Di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, (19), 45–54

pertanian jagung adalah kesiapan dari Sumber Daya Manusia (SDM) terkait masih rendah, pengetahuan pengelolaan yang kurang mumpuni dan perencanaan pengembangan yang tidak terstruktur. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2020-2025⁵ ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada pertanian, yaitu 1). Karena kemiskinan, akses penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan dan pemenuhan gizi menjadi rendah, 2). Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, 3). Luas lahan menurun dan kepemilikan lahan oleh petani semakin sempit, 4). Pendidikan petani rata rata masih berada pada lulusan SLTP kebawah dan munculnya kelompok tani baru yang belum berpengalaman, 5). Kemiskinan di pedesaan, 6). Dampak disrupti revolusi industri 4.0, 7). Dampak perubahan iklim, 8). Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani.

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang disumbangkan oleh sektor pertanian, tentunya harus ada perubahan yang dilakukan, Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut : a. Terjaganya ketahanan pangan nasional, b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Kebijakan yang diambil kementerian pertanian tersebut harus terus digarap dan dikembangkan dengan baik dan terstruktur dengan jelas. Kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pengembangan dan pengoptimalan dari kebijakan yang dicanangkan.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap

⁵ Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional 2020-2025

lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian. Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan yang berkaitan dengan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian. Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan research and development (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik)

Jawa Timur memiliki berbagai potensi terkait pertanian, dapat dilihat dari dukungan sumberdaya lahan pertanian menurut BPS Jawa Timur 2020, pada tahun 2017, lahan pertanian di Jawa Timur memiliki luas 3.641.893,3 hektar, terdiri sawah irigasi seluas 916.639,8 hektar, sawah non irigasi 257.748,6 hektar dengan total sawah seluas 1.174.388,3 hektar dan lahan bukan sawah seluas 2.467.505 hektar dengan rencana Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Jawa Timur seluas 1.017.549,73 hektar, terdiri lahan irigasi 802.357,90 hektar dan Lahan kering 215.191,83 hektar⁶.

Selain potensi lahan, sebagian besar penduduk Jawa Timur berdasarkan Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur 2017 menunjukkan bahwa Struktur tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan sebanyak 33,40 persen melakukan aktivitas dibidang pertanian, demikian pula dari Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 Provinsi Jawa Timur terdapat 6.290.107 petani di Jawa Timur yang semakin mengokohkan sektor pertanian

⁶ Badan Pusat Statistik (2022) Dokumen Jawa Timur dalam Angka 2022. Surabaya: Badan Pusat Statistik

sebagai pendorong pembangunan ekonomi Jawa Timur terutama di perdesaan. dengan capaian kontribusi melalui penyediaan bahan pangan. Kinerja program pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana prasarana, penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian serta dukungan potensi sumber daya alam. Berdasarkan data yang diperoleh dari RPJMD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur 2020, dapat dilihat perkembangan produksi pertanian Jawa Timur yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1 Perkembangan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Jawa Timur Tahun 2015 – 2018 (Ton)

Komoditas	2015	2016	2017	2018	Perkembangan 2015-2016	Perkembangan 2016-2017	Perkembangan 2017 -2018
Padi	13.154.967	13.633.701	13.060.464	10.537.922	3,6%	-4,2 %	-19,3 %
Jagung	6.131.163	6.278.264	6.335.252	6.753.563	2,4%	0,9%	6,6%
Kedelai	344.998	274.317	200.916	217.246	-20,4%	-26,7%	0,8 %

Sumber : RPJMD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur 2020 (data diolah)

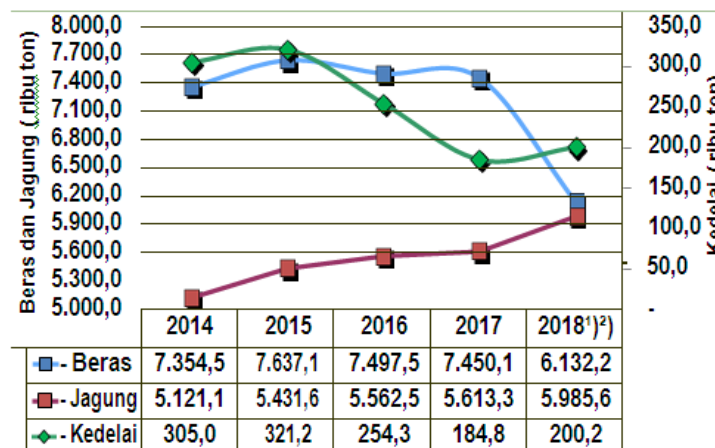
Dalam tabel tersebut menunjukkan data perkembangan 3 besar komoditas pangan, yaitu ada padi, jagung dan juga kedelai. Dalam data perkembangannya komoditas jagung memiliki nilai perkembangan yang tinggi, yaitu pada tahun 2017 memperoleh 6.335.252 ton dan pada tahun 2018 memperoleh 6.753.563 ton. Sehingga terdapat peningkatan produktifitas komoditas jagung sebesar 418.311 ton. Dari ke tiga komoditas tersebut, yang memiliki perkembangan produktivitas yang baik adalah jagung. Karena komoditas jagung setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak secara signifikan. Pada Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 147.101 Ton atau sebesar 0,02%. Untuk tahun 17 mengalami kenaikan kembali namun nilainya kecil yaitu sebesar 56.988 Ton. Dan kenaikan

tertinggi ada di tahun 2018 yang mana produktivitasnya naik 6,6% dari tahun sebelumnya atau bertambah sebesar 418.311 Ton.

Berbanding terbalik, padi sebagai komoditas pokok utama justru mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2018. Yang mana pada tahun 2018 padi mengalami penurunan produktivitas hingga 19.3% atau sebesar 2.522.542 Ton. Pada tahun 2017 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 573.237 atau 4,2%.

Kemudian untuk kedelai menunjukkan perbaikan produktivitasnya. Dimana pada tahun tahun sebelumnya selalu mengalami penurunan yang cukup besar. Pada tahun 2016 mengalami penurunan produktivitas sebesar 29,4% atau setara 70.681 Ton. Untuk Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 26% atau sebesar 73.401 Ton. Tapi di tahun 2018 mampu mempertahankan produktivitasnya bahkan terdapat perkembangan sebesar 0,8 % atau sebesar 16.330 Ton. Angka tersebut tidak besar tapi dapat menunjukkan arah yang lebih baik

Selain itu Realisasi ketersediaan pangan Jawa Timur dijelaskan dalam gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1. 1 Realisasi Ketersediaan Beras, Jagung, Dan Kedelai Jawa Timur Tahun 2014-2018

Dalam gambar 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 – 2018 ketersediaan beras menunjukkan pertumbuhan negatif 4,08 persen, jagung 4,00 persen dan kedelai pun tumbuh negatif 8,62 persen dengan realisasi ketersediaan (ton). Perkembangan ketersediaan pada tahun 2018 sebagai berikut : untuk beras sebesar 6,13 juta ton, jagung sebesar 5,99 juta ton dan kedelai sebesar 200 ribu ton⁷. Dalam perkembangan ketersediaan bahan pangan tersebut, yang perkembangannya mengalami peningkatan setiap tahun dan cenderung stabil adalah ketersediaan jagung. Lebih lanjut, data terkait dengan produksi jagung yang terdapat pada kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur dijelaskan dalam tabel 1.2 berikut :

Tabel 1. 2 Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2019

No	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Produksi Jagung (ton) <i>Maize Production (ton)</i>	Presentase
	Kabupaten/Regency		
1	Pacitan	110,126	1,631 %
2	Ponorogo	238. 283	3,886 %
3	Trenggalek	90. 076	1,469 %
4	Tulungagung	324. 452	5,292 %
5	Blitar	360. 357	5,877 %
6	Kediri	362. 501	5,912 %
7	Malang	287. 175	4,684 %
8	Lumajang	134. 493	2,194 %

⁷ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (2020) Dkumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Surabaya : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Produksi Jagung (ton) <i>Maize Production (ton)</i>	Presentase
9	Jember	427.064	6,965 %
10	Banyuwangi	183.612	2,995 %
11	Bondowoso	148.668	2,167 %
12	Situbondo	241.091	3,932 %
13	Probolinggo	207.461	3,384 %
14	Pasuruan	250.518	4,086 %
15	Sidoarjo	687	0,011 %
16	Mojokerto	125.882	2,053 %
17	Jombang	211.164	3,444 %
18	Nganjuk	241.546	3,940 %
19	Madiun	38.187	0,623 %
20	Magetan	85.859	1,400 %
21	Ngawi	188.653	3,077 %
22	Bojonegoro	225.553	3,679 %
23	Tuban	506.966	8,269 %
24.	Lamongan	290.920	4,745 %
25	Gresik	112.451	1,834 %
26	Bangkalan	124.260	2,167 %
27	Sampang	98.332	1,604 %
28	Pamekasan	93.793	1,530 %
29	Sumenep	396.067	6,460 %
	Kota/Municipality		
30	Kediri	5.577	0,091 %
31	Blitar	350.8177	0,145 %

No	Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Produksi Jagung (ton) <i>Maize Production (ton)</i>	Presentase
32	Malang	640	0,010 %
33	Probolinggo	25 .146	0,410 %
34	Pasuruan	...	0
35	Mojokerto	36	0,0006 %
36	Madiun	32	0,0005 %
37	Surabaya	917	0,015 %
38	Batu	1.055	0,017 %
	Jawa Timur	6. 131.163	

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2022 (data diolah)

Dalam tabel 1.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa hampir seluruh wilayah di Jawa Timur sangat berpotensi untuk dikembangkan sektor industri pertaniannya. BPS (2022) melaporkan bahwa Jawa Timur adalah sentra jagung peringkat pertama di Indonesia. Pada tahun 2015, provinsi ini memproduksi jagung sebesar 31,26% atau sebesar 6.131.163 ton dari produksi jagung nasional 19.612.435 ton. Dan kabupaten dengan jumlah produksi jagung tertinggi adalah Kabupaten Tuban dengan jumlah produksi sebesar 506.970 ton, tertinggi kedua adalah kabupaten Jember dengan kontribusi sebesar 427. 064 ton, serta kota yang ada di Jawa Timur penyumbang jagung terbesar adalah kota Probolinggo dengan 25 .146 ton⁸.

Dalam penerapan program pembangunan pada sektor pertanian ini dihadapkan pada beberapa tantangan, diantaranya : a) Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk; b) Semakin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; c) Adanya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; d) Semakin pesatnya

⁸ Badan Pusat Statistik (2022) Dokumen Jawa Timur Dalam Angka 2022. Surabaya : Badan Pusat Statistik

kemajuan teknologi dan informasi; e) Perubahan iklim global; f) masih rendahnya nilai tukar petani; g) Dibutuhkannya strategi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan yang kemudian akan merujuk kepada tercapainya Pembangunan Berkelanjutan. Dan hal itu juga menjadi tantangan yang dialami oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten dari 38 kabupaten dan kota yang terdapat di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Keberadaan Kabupaten Tuban terletak di jalur pantai utara Pulau Jawa dan memiliki luas 1.904,70 km². Kabupaten mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan. Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tuban sangat beraneka ragam sumbernya. Kabupaten Tuban memiliki sektor unggulan yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Dengan adanya sektor pertanian yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Tuban, maka hendaknya masyarakat Tuban mampu mengelola dan mengembangkannya sehingga dapat bermanfaat. Kabupaten Tuban memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Luas daerah menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah (wetland) 54.860.530 Ha dan lahan kering (dryland) seluas 129.134,031 Ha. Lahan pertanian di Kabupaten Tuban didominasi oleh lahan kering (ladang/tegalan) dengan luas 57.485,44 Ha atau 30,22 %, sedangkan untuk luasan lahan sawah termasuk didalamnya sawah tambak adalah sebesar 18.731 Ha⁹.

Lebih lanjut, data yang berkaitan dengan luas dan produksi jagung yang ada di Kabupaten Tuban dijelaskan pada tabel 1.3 di bawah ini :

⁹ Badan Pusat Statistik (2022) Dokumen Kabupaten Tuban dalam Angka 2022. Kabupaten Tuban : Badan Pusat Statistik

Tabel 1. 3 Luas Panen Dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tuban,2021

No	Kecamatan	Luas Panen Jagung (ha)	Produksi jagung (ton)	Presentase Produktivitas Jagung
1	Kenduruan	3. 146	17.064	2,35 %
2	Bangilan	3. 352	17.896	4,46 %
3	Senori	4. 105	22.087	3,04 %
4	Singgahan	5.122	28.238	3,89 %
5	Montong	14.942	83.070	11,43 %
6	Parengan	8.323	45.954	6,32 %
7	Soko	7.807	43. 351	5,97 %
8	Rengel	4.023	22.316	3,07 %
9	Grabagan	8.010	46.264	6,37 %
10	Plumpang	2.020	11.552	1,59 %
11	Widang	880	5.122	0,70 %
12	Palang	5.432	31.345	4,31 %
13	Semanding	12.466	70.991	9,77 %
14	Tuban	678	3.757	0,51 %
15	Jenu	7.020	43.153	5,94 %
16	Merakurak	6.224	34.759	4,78 %
17	Kerek	17.703	99.468	13,69 %
18	Tambakboyo	6.071	34.788	4,79 %

No	Kecamatan	Luas Panen Jagung (ha)	Produksi jagung (ton)	Presentase Produktivitas Jagung
19	Jatirogo	8.147	47.021	6,47 %
20	Bancar	3.242	18.388	2,53 %
Tuban		128.713	726.585	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2022 (data diolah)

Menurut data BPS Kabupaten Tuban 2022 dalam tabel 1.3 tersebut, terdapat lahan panen Jagung seluas 128.713 ha dan hasil panen jagung sebanyak 726.585 Ton. Pada tahun 2018, Tuban mampu mencapai peningkatan luas tanam jagung tertinggi tingkat nasional, dan berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan oleh Kementerian Pertanian. Kecamatan yang paling banyak kontribusi dalam hasil panen jagung adalah Kecamatan Kerek dengan hasil produksi sebesar 99.468 ton dengan memiliki luas lahan 17.703 ha. Kemudian dilanjut dengan Kecamatan Montong dengan hasil produksi sebesar 83.070 ton dengan luas wilayah 14.942 ha. Sedangkan Jatirogo yang menjadi lokasi implementasi kebijakan korporasi petani benih jagung hanya mempunyai lahan seluas 8.147 ha dengan produksi jagung (konsumsi) sebanyak 47.021 ton¹⁰.

Tapi disini Jatirogo memiliki lokasi yang strategis dimana langsung berbatasan dengan Jawa Tengah, memiliki lahan yang tepat dan sesuai jika dilakukan penanaman benih jagung. Ditambah lagi sumber daya manusia dari para petani yang dinilai kooperatif dan mampu memegang komitmen dan tanggung jawab, sehingga Kecamatan Jatirogo diberikan kepercayaan oleh Pemerintah kabupatn Tuban dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban untuk menanam Jagung perbenihan dengan korporasi

¹⁰ Badan Pusat Statistik (2022) Dokumen Kabupaten Tuban dalam Angka 2022. Kabupaten Tuban : Badan Pusat Statistik

Produktivitas jagung tersebut juga dipengaruhi oleh adanya benih yang berkualitas. Seperti yang ada di Kabupaten Tuban dengan adanya implementasi kebijakan program korporasi petani benih jagung yang menggandeng PT. Tunas Widji Inti Nayottama. Pada tahun 2020 stok jagung perbenihan yang terdapat di Kabupaten Tuban adalah kurang lebih 14.000 Ton.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Tuban, diperlukan adanya peran aktif seluruh *stakeholder* dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan dari implementasi kebijakan korporasi benih jagung yang ada di Kabupaten Tuban. Dikarenakan keberhasilan dalam implementasi sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, sikap mental, tekad dan semangat aparaturnya Pemerintah Kabupaten Tuban, komitmen dan dukungan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta kerjasama yang efektif dan berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pencapaian tujuan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh *stakeholder* itu sendiri. Identifikasi *stakeholders* diperlukan untuk mengetahui peranan masing-masing *stakeholder* yang merupakan semua aktor atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan dari sebuah program¹¹.

Banyaknya *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan korporasi benih jagung menyebabkan tantangan tersendiri seperti mementingkan kepentingan instansi masing-masing, ingin mendapatkan keuntungan masing-masing. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga masih rendah terutama para petani. Kurangnya pengetahuan terkait ilmu dalam hal pertanian menjadi pemicu kurangnya kesejahteraan, hasil dari produksi jagung hanya diproduksi kemudian dijual untuk konsumsi dan dijadikan sebagai bahan persediaan pangan. kurangnya bimbingan dari beberapa pihak terkait juga turut andil dalam kendala

¹¹ Buana. A. & Setyono. J. S. (2022) Analisis Stakeholder dalam Penyusunan Rpjmg Gampong Dayah di Kabupaten Pidie, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2).

yang dihadapi oleh Kabupaten Tuban dalam pengembangan produksi jagung ini, sehingga pemberdayaan masyarakat khususnya para petani masih kurang.

Kekuatan dan kepentingan yang dimiliki oleh para *stakeholder* juga turut mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan ataupun program yang dijalankan. Hubungan yang terjadi antar *stakeholder* juga penting dan harus mendapat perhatian, karena jika masing-masing *stakeholder* terlalu fokus dan mementingkan kepentingan instansinya masing-masing maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Apalagi kebijakan korporasi petani benih jagung di Kabupaten Tuban ini memerlukan sebuah perasaan saling membutuhkan satu sama lain, maka jika salah satu tidak menjalankan tugas dan kepentingannya dengan baik akan mempengaruhi hasil produktivitas benih jagung dan hal tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan tersendiri di kemudian hari ini.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, menyatakan ada beberapa isu permasalahan yang turut mewarnai perkembangan pertanian di Kabupaten Tuban, yaitu 1). Kurangnya tingkat produksi yang terdapat pada komoditas pertanian dan perkebunan; 2). Keterbatasan lahan atau area yang digunakan untuk pengembangan sentra agribisnis di wilayah Kabupaten Tuban; 3). Kemampuan yang dimiliki oleh kelompok tani masih belum merata, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jumlah/kuantitas serta kompetensi tenaga penyuluh. 4). Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan¹².

Kabupaten Tuban merupakan satu diantara 3 daerah yang pada tahun 2019 ditunjuk oleh Kementerian Pertanian untuk menjalankan sebuah program perbenihan. Perbenihan ini ada bermacam-macam, seperti padi, jagung dan lainnya dan yang ingin di tekankan dalam hal ini adalah korporasinya. Dengan

¹² Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban (2022) Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Tuban : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban

adanya program dari kebijakan terkait korporasi ini bertujuan untuk memberdayakan petani setempat dan karena *best practice* di Kabupaten Tuban adalah hasil pertanian yaitu jagung, maka Dinas pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Tuban mulai memetakan dan melaksanakan kebijakan terkait perbenihan jagung. Dengan kegigihan dari semua pihak, yang semula pada tahun 2019 yang awalnya hanya memiliki areal tanam perbenihan jagung seluas 439,6 Ha kemudian pada tahun 2020 sudah mencapai 999,6 Ha, hal ini dikarenakan adanya alokasi pengembangan seluas 560 ha. Kemudian untuk tahun 2021 program korporasi tersebut mengalami penurunan pada luasan lahan. Hal ini disebabkan karena bantuan dari pemerintah yang mulai dipangkas. Berikut merupakan hasil produktivitas jagung perbenihan pada tahun 2021

No	Varietas	Luas lahan (Ha)	Gagal (Ha)	Wilayah	Tanggal tanam	Tanggal Panen	Jumlah (Kg)
1.	JH 37	128,70	-	Jatirogo, Tuban	20 - 25 Desember 2020	9 – 20 April 2021	390.024
2.	RK 457	13,45	5,80	Jatirogo, Tuban	8-26 Mei 2021	16 Agustus – 5 September 2021	47.670
3.	RK 457	23.00	5,30	Jatirogo, Tuban	30 Mei – 12 Juni 2021	15-24 September 2021	75.340
4.	RK 457	24,80	0,20	Jatirogo, Tuban	28 Juli – 9 Agustus 2021	10-24 November 2021	100.009

Total	189,95	11,3		613.043
--------------	---------------	-------------	--	----------------

Tabel 1. 4 Data Panen Jagung Perbenihan Korporasi Tuban Tahun 2021

Sumber : Dokumen PT. Tunas Widji Inti Nayyotama 2021 (Data Diolah)

Dalam tabel 1.4 tersebut dituliskan bahwasannya perolehan jagung perbenihan selama bulan April hingga November tahun 2021 adalah sebesar 613.043 Ton dengan luas lahan seluas 189,95 Ha. Dalam tabel tersebut juga di ketahui bahwa pada awal tahun 2021 lahan yang digunakan untuk Jagung perbenihan masih luas yaitu sekitar 128,70 Ha¹³ Sedangkan unuk penanaman berikutnya lahan yang digunakan cenderung menurun cukup signifikan, sehingga hal ini juga turut menjadi faktor penyebab berkurangnya jumlah benih jagung yang diperoleh

Kawasan tersebut dapat berjalan hingga saat ini adalah berkat komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak terkait. Strategi pemerintah untuk mendukung pengimplemntasian kebijakan tersebut adalah dengan memberikan fasilitas yaitu dengan menunjuk **PT.Tunas Widji Inti Nayottama** sebagai mitra petani sekaligus pendampingan dalam proses perbenihan jagung di Kabupaten Tuban. **PT.Tunas Widji Inti Nayottama** merupakan sebuah perusahaan produsen benih jagung, yang mana perusahaan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan membeli hasil panen jagung petani. Rata-rata produktivitas dari perbenihan jagung di Kabupaten Tuban ini berkisar 3,5 sampai dengan 5 Ton/Ha (pada musim kering) dengan harga perkilo sebesar Rp.5000/Kg

Dengan menjalankan amanah dari Kementerian Pertanian dan dengan adanya pembekalan dan pendampingan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten Tuban serta Kementerian Pertanian dapat menjadikan Tuban sebagai pilot Project pengembangan benih jagung hibrida berbasis korporasi Petani (Musthofa & Kurnia, 2018) mengartikan

¹³ PT. Tunas Widji Inti Nayotama (2022) Dokumen Data Panen Jagung Hibrida 2021. Tuban : PT. Tunas Widji Inti Nayotama

korporasi petani (*corporate farming*) sebagai “kegiatan penggabungan lahan usaha tani untuk dikelola secara bersama-sama oleh para petani dan terpadu di dalam satu manajemen”¹⁴. Korporasi Petani (*Corporate farming*) juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan pada masing-masing petani, sehingga efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya dapat dicapai.

Tujuan jangka panjang pengembangan korporasi petani (*corporate farming*) adalah mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi. Inti dari pengembangan korporasi petani dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum yang mampu menciptakan unit usaha bisnis pertanian secara mandiri maupun bermitra dengan badan usaha lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Melalui pengembangan unit bisnis di dalam korporasi petani, diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani melalui sinergi dan kerja sama dengan pelaku usaha besar lainnya karena korporasi petani memiliki potensi untuk menjadi organisasi bisnis yang modern diantaranya yaitu : a). Memiliki skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien; b) Produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri pengguna bahan baku yang dihasilkan oleh anggota korporasi petani; c). Menjadi organisasi bisnis yang dikelola secara profesional untuk menjamin keberlanjutan usaha pertanian; d). Menyediakan bahan baku yang berkualitas bagi industri besar secara berkesinambungan; e). Menciptakan kemitraan antara korporasi petani dan usaha besar yang saling menguntungkan bagi pertumbuhan pertanian dan industri pengolahan hasil

¹⁴ Musthofa, I., & Kurnia, G. (2018). Prospek Penerapan Sistem Corporate Farming. *Jurnal Agrisepe*, 16(1), 11–22

pertanian; f). Mampu mengakses sumber pendanaan inklusif untuk meningkatkan produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional; g). Dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya untuk membentuk unit usaha profesional yang berkualitas dan berdaya saing.

Korporasi petani (corporation farming) yang dilakukan di Kabupaten Tuban terkait pengembangan produksi benih jagung melibatkan 23 kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 1.483 petani selama tahun 2020 yang terdapat di Kecamatan Jatirogo, Tuban¹⁵. Kemudian untuk memperbaiki sistem korporasi yang berjalan dan sebagai strategi dalam pengembangan program dari kebijakan ini, maka dibentuklah sebuah koperasi tani yang diberi nama “ Firma Tani Nusantara” yang mana koperasi ini sudah Berbadan Hukum Indonesia (BHI). Kecamatan Jatirogo terpilih menjadi wilayah pertama yang menjalankan korporasi petani dalam perbenihan jagung dikarenakan wilayah ini adalah wilayah yang dianggap cocok karena berbagai alasan, seperti misalnya kadar air dalam tanah, cuaca, dan lain sebagainya.

Korporasi petani yang dilakukan sengaja berada dalam 1 wilayah. Hal ini karena ada beberapa alasan yang melatarbelakangi yaitu 1). Benih jagung yang digunakan adalah benih jagung hibrida, proses perbenihan ini harus diperlakukan berbeda dari jenis jagung lainnya yang hal ini membuat jagung tidak bisa di tanam dengan terpisah-pisah wilayahnya karena akan membuat penanaman dan produksi tidak optimal. Hal ini dapat terjadi karena jenis jagung hibrida tidak akan berkembang sempurna jika terkontaminasi dengan serbuk sari dari jagung dengan jenis lain. sehingga hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya perbenihan. 2). Agar lebih mudah dalam mengalokasikan dana. Karena korporasi petani ini baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Tuban, maka untuk mempermudah alokasi dana dan mengatur strategi keuangan maka penanaman difokuskan dalam 1 wilayah saja. Selain itu, para petani juga lebih mudah dalam

¹⁵ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban (2020) Dokumen Bahan Sambutan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban.

berkoordinasi satu sama lain. Dengan adanya korporasi petani jagung perbenihan ini diharapkan memberikan berbagai manfaat dan memberikan efisiensi serta efektifitas dalam melakukan penanaman jagung tersebut.

Dalam satu tahun keberlangsungan implementasi kebijakan korporasi benih jagung, Kabupaten Tuban yang menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang mampu mengeksport benih jagung hibrida berbasis korporasi. Pengelolaan sistem perbenihan dilakukan secara professional seperti korporasi sehingga nantinya petani akan mendapatkan keuntungan karena skala bisnisnya yang lebih besar dan biaya produksi yang lebih efisien. Oleh karena itu, untuk mengembangkan produksi benih jagung hibrida yang terdapat di Tuban, peran serta para stakeholders yang terlibat sangat menentukan arah keberhasilan dalam pembangunan.

Pada awalnya para petani yang terdapat di Kecamatan Jatirogo kurang tertarik dengan adanya korporasi petani dalam pengembangan benih jagung ini, kemudian setelah mengetahui keuntungan yang cukup besar, maka para petani banyak yang ikut bergabung dan berminat untuk melakukan pengembangan benih jagung hibrida. Pada awal pembentukan, kegiatan ini hanya terlaksana untuk 98 Hektar, kemudian banyak petani yang berminat sehingga luasan areal ditambah 560 hektar untuk tahun 2020¹⁶ dan pada tanggal 12 Desember 2020, kabupaten melepas ekspor benih jagung hibrida ke Thailand. Dengan adanya ekspor yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menandakan bahwa produk rakitan anak bangsa ini memiliki kualitas yang baik dan berdaya saing tinggi hingga menembus pasar internasional.

Adapun penelitian terdahulu yang melatar belakangi pembuatan penelitian ini antara lain :

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

¹⁶ Utomo, T. B. (2020, April 11). Tuban Kembangkan Bibit Jagung Kualitas Ekspor

No	Penulis	Tahun	Judul	Tujuan	Isi
1	Dwi Bhakti Iriantini et.all ¹⁷	2019	Pengembangan Kawasan Agropolitan Gendangsari dengan Model Coorporate Farming Kabupaten Madiun	Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan penelitian mengenai pengembangan Kawasan Gendangsari Kabupaten Madiun sebagai Coorporate Farming (CF)	Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai konsep konsep pengembangan korporasi pertanian (CP) KAG yang didasarkan pada kondisi (potensi dan aktual), SWOT, akar permasalahan dan tujuan agribisnis KAG itu sendiri, meskipun dalam perjalanannya dalam pengembangan kawasan agropolitan muncul kreatifitas dan inprovisasi bisnis baik di sisi hulu (up- stream), tengah (internal) maupun sisi hilir (down stream). Kawasan Agropolitan Gendangsari dapat dikembangkan menjadi salah satu model Coorporate Farming di Kabupaten Madiun

¹⁷ Iriantini, D. B., & Thohiron, M. (2019). Pengembangan Kawasan Agropolitan Gendangsari dengan Model Coorporate Farming Kabupaten Madiun. *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah*, 1(2), 78–90

2	Umin Kango ¹⁸	2019	Strategi Pemasaran Jagung Gorontalo Sebagai Program Unggulan daerah	Penelitian yang dilakukan oleh Umin Kango ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam strategi pemasaran, dan membuat rekomendasi strategi kebijakan terkait produksi jagung untuk masa depan	Hasil penelitian ini menemukan bahwa : 1) strategi pemasaran sekarang ini masih terbatas pada pelaksanaan <i>marketing mix</i> (produk, harga, distribusi promosi), dan belum dilaksanakan secara maksimal. dalam pelaksanaan strategi pemasaran jagung ke depan ada dua strategi yang diperlukan, yaitu : a) strategi guna mencapai keunggulan bersaing dalam bidang pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan : Strategi Korporasi, Strategi Bisnis, Strategi Fungsional. b) strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan : strategi <i>marketing mix</i> (4P), strategi <i>diferensiasi</i> ,
---	--------------------------	------	---	---	---

¹⁸ Kango, U. (2019). Strategi pemasaran jagung gorontalo sebagai program unggulan daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 366–391

					strategi <i>branding</i> dan strategi <i>positioning</i>
3	Ika Setiasih et.all ¹⁹	2020	Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani Di Kabupaten Lebak, Banten	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan proyek percontohan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh usahatani skala kecil adalah tidak tercapainya skala ekonomi, sehingga penggunaan input dan teknologi menjadi tidak efisien. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh capaian kinerja pelaksanaan proyek percontohan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi

¹⁹ Setiasih, I., Suryana, A., Darmaga, J. R., & Darmaga, K. I. P. B. (2020). Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani Di Kabupaten Lebak , Banten The Development of Corn Area Based on Farmer Corporation in Lebak Regency , Banten. Analisis Kebijakan Pertanian, 18(2)

					<p>petani di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian dianalisis menggunakan model evaluasi <i>context, input, process, product</i> (CIPP) dan menentukan prioritas strategi pengembangan menggunakan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP). Penelitian ini menekankan bahwa strategi yang perlu diprioritaskan adalah mengenai pemberdayaan petani dalam suatu korporasi (kelembagaan petani), dan faktor yang dinilai paling penting dalam pengembangan kawasan agropolitan gendangsari dengan model <i>coorporate farming</i> kabupaten madiun adalah tercapainya kesejahteraan petani</p>
4	Indriati Agustina Gultom	2020	Analisis Perencanaan Sektor Pertanian Berbasis	Untuk melihat transformasi pertanian dengan adanya	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyusun model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi dapat

	et.all ²⁰		Korporasi	sistem korporasi	dilakukan dengan beberapa opsi dengan melakukan studi pada daerah lain di Indonesia. Kegiatan Sosialisasi, ataupun Pendampingan kegiatan percontohan model dilakukan dengan menggunakan Konsep Pentahelix, yakni sebuah konsep yang Kolaborasi kerjasama antar lini/bidang Pemerintah, Universitas, Investor, Media dan Petani
5	Mokh. Rum ²¹	2020	Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas jagung Hibrida Unggul	memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar daya saing dan dampak kebijakan pemerintah	penelitian ini juga menggunakan metode analisis Matrik PAM (<i>Policy Analysis matrix</i> . yang mana berdasarkan analisis yang dilakukan pada penelitian ni, peneliti berpendapat bahwa adanya

²⁰ Gultom, I. A., Puspa, A. K., Dharmawan, Y. Y., & Subing, A. (2020). Analisis perencanaan Sektor Pertanian Berbasis Korporasi. 9(September), 16–20

²¹ Rum, M., Diana, N., Tamami, B., & Triyasari, S. R. (2020). Daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas jagung hibrida unggul Madura. *Journal of Agricultural Socio-Economics*, 1(1), 31–40

			Madura	terhadap komoditas jagung hibrida unggul Madura.	daya saing yang cukup tinggi dalam komoditas jagung hibrida Madura yaitu adanya keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif yang ada didalamnya. Kebijakan Pemerintah juga memiliki dampak yang nyata terhadap pendapatan pada usaha tani jagung hibrida unggul Madura yang utamanya pada keuntungan privat
6	Lely, O.A, dkk ²²	2020	Pendampingan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Sentra Produksi Jagung Hibrida di Desa Morome, Kabupaten Konawe	Penelitian ini bertujuan untuk mendampingi masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada Desa Morome	dalam penelitian ini penulismenyatakan bahwa kegiatan pendampingan ini berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas hasil panen jagung hibrida yang mana hal tersebut adalah upaya yang mendukung Desa Morome dijuluki sebagai sentra

²² Anwar, L. O., Sari, S. F., & Fekri, L. (2020). Pendampingan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Sentra Produksi Jagung Hibrida di Desa Morome , Kabupaten Konawe Selatan , Sulawesi Tenggara (Mentoring of Community in the Effort of Developing Hybrid Corn Production Centers in Morome Village , Konawe Selatan District , Southeast Sulawesi). 6(November), 222–228.

			Selatan, Sulawesi Tenggara	melalui peningkatan produksi jagung hibrida.	produksi jagung hibrida
--	--	--	----------------------------------	---	-------------------------

Berdasarkan pemaparan beberapa studi terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki aspek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Menurut sepengetahuan peneliti selama ini, penelitian terdahulu menekankan pada bagaimana sistem korporasi dapat berjalan di sector pertanian dan menekankan pada pengembangan petani. Sedangkan penelitian ini berbeda dan lebih menekankan implementasi kebijakan korporasi petani benih jagung yang kemudian dilihat peta stakeholdernya menggunakan analisis stakeholder. Fokusnya adalah pemetaan stakeholder yang terkait dalam kebijakan korporasi petani benih jagung yang terdapat di Kabupaten Tuban. Sehingga Kabupaten Tuban mampu menjadi *pilot project* dalam pengembangan benih jagung ini. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan melihat peran serta dari berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, dinas terkait dan pihak swasta dan masyarakat yang terlibat dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tersebut, sehingga apa yang telah diimplementasikan dapat memberikan peningkatan terkait hasil dan lainnya.

Artinya dalam implementasi kebijakan korporasi petani benih jagung ini lebih difokuskan pada pemetaan aktor serta beberapa pihak terkait. Kemudian para aktor yang terlibat ini dilakukan pemetaan guna melihat dan memahami dimana letak, kepentingan dan kekuatan dari masing-masing aktor. Dengan adanya kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban ini difokuskan untuk menumbuhkan daya saing hingga pasar internasional. Sehingga masyarakat setempat khususnya para petani dapat menerima manfaat dan keuntungan dari adanya kebijakan korporasi tersebut

Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan mengingat bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat membantu dalam menciptakan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat saat ini dan menjadi salah satu sector yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian target dan tujuan dalam penurunan angka kemiskinan dan juga sebagai acuan dalam daya saing internasional. Adanya fakta bahwa pembangunan pertanian di Indonesia terkendala dengan kurangnya pengetahuan dan pendampingan dari beberapa pihak terkait memperkuat bahwa penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam mendeskripsikan implementasi kebijakan korporasi benih jagung dan menjabarkan peta stakeholder dengan menggunakan analisis stakeholders

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan korporasi petani benih jagung di Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana peta stakeholder dalam implementasi kebijakan korporasi petani benih jagung di Kabupaten Tuban ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tujuan penelitian digunakan sebagai pedoman untuk membahas mengenai penelitian dan setiap penelitian pasti memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan korporasi petani benih jagung di Kabupaten Tuban dan juga mendeskripsikan peta stakeholder dengan menggunakan analisis stakeholder. Sehingga dengan adanya analisis ini dapat mengetahui sejauh mana kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder yang terlibat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dan dapat mengisi celah atau kekosongan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, serta sebagai informasi, masukan dan bahan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa dengan objek yang berbeda. Kemudian penelitian ini diharapkan menjadi prespektif baru yang mana nantinya dapat mengembangkan bidang Administrasi Publik terutama pada sektor kebijakan publik ataupun studi implementasi terkait sebuah kebijakan publik terhadap program maupun kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi terkait implementasi kebijakan korporasi benih jagung, yang merupakan program preventif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat terutama petani. Yang mana tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dan mampu dijadikan daya saing hingga sampai ke pasar internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi sebagai informasi dan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan korporasi petani serta berkontribusi secara menyeluruh dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dan kepada masyarakat Kabupaten Tuban yang notabennya bekerja sebagai petani serta kepada stakeholder yang terkait dalam pembuatan kebijakan tersebut. Solusi yang ditemukan pada penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam upaya implementasi pada program korporasi petani benih jagung yang nantinya dapat mengembangkan

program tersebut menjadi maju dan berdaya saing tinggi, serta dapat berkembang secara terstruktur dan berkelanjutan.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam bagian ini, peneliti akan menguraikan berbagai kerangka teori sebagai landasan pemahaman yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk dapat memahami masalah dalam penelitian maka perlu adanya landasan berpikir berupa kerangka teori. Teori merupakan serangkaian konsep, asumsi, konstruksi, definisi, komposisi yang menjelaskan mengenai suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan beberapa konsep.

1.5.1 Stakeholder

Menurut Freeman *stakeholder* adalah kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program (Freeman, 2010). Selain individu yang dianggap sebagai stakeholder, kelompok maupun institusi yang memiliki pengaruh terhadap usulan kebijakan atau hasil kebijakan baik itu berdampak negatif maupun positif bagi sebagian pihak termasuk bagian dari stakeholder²³. Proses analisis setiap stakeholder diperlukan untuk mengetahui setiap peran masing-masing semua aktor atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu kebijakan, keputusan maupun tindakan dari suatu program yang dilaksanakan. *World Health Organization* (WHO) menjabarkan definisi *stakeholder* yaitu pihak yang dapat secara langsung atau tidak secara langsung dipengaruhi oleh suatu proses atau dampak (*“who may be directly or indirectly affected by the process or the outcome”*).

²³ Buana, A. & Setyono, J. S. (2022) Analisis Stakeholder dalam Penyusunan Rpjmg Gampong Dayah di Kabupaten Pidie, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2)

Selain itu *Stakeholders* juga dapat didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dukungannya dibutuhkan untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu organisasi atau negara. Clarkson dalam *Gabler Edition Wissenschaft* (2008:6) membagi *stakeholders* menjadi dua yaitu *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* primer merupakan pihak dimana tanpa keterlibatannya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan.

Menurut Clarkson, suatu organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem *stakeholders* primer yang merupakan rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai hak, tujuan, harapan dan tanggung jawab yang berbeda. Sedangkan *Stakeholders* sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan organisasi dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup organisasi.

1.5.1.1 Analisis Stakeholder

Pentingnya melibatkan seluruh stakeholder dalam membuat sebuah kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintahan untuk melakukan analisis stakeholder, hal ini dilakukan agar dapat melihat dan menempatkan kepentingan dengan bijak. Analisis Stakeholder merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pemetaan kekuatan, posisi, dan sudut pandang yang terdapat dalam masing-masing stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pembuatan kebijakan atau pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan tahapan dalam buku PMBOK 5th Edition, langkah pertama yang dilakukan untuk menganalisis stakeholder adalah dengan melakukan identifikasi berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masing-masing stakeholder. Para stakeholder adalah mereka secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam menentukan apa yang perlu dicapai sebuah proyek atau sebuah program dan bagaimana cara mencapainya. Stakeholder dalam penelitian

ini dibagi menjadi tiga yaitu stakeholder primer (utama), stakeholder sekunder (pendukung), dan stakeholder kunci

Secara garis besar, pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok (Crosby, 1992 dalam Riskiyah, 2018)²⁴, yaitu:

a. *Stakeholder* utama (*primary stakeholder*)

Stakeholder utama adalah stakeholder yang menerima dampak positif atau negatif (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan.

b. *Stakeholder* penunjang (*secondary stakeholder*)

Adalah mereka yang tidak memiliki keterkaitan langsung tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara atau dengan kata lain merupakan mereka yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian suatu kegiatan atau proses kebijakan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Dalam beberapa kegiatan, pemangku kepentingan penunjang dapat merupakan perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal.

c. *Stakeholder* kunci (*key stakeholder*)

Adalah mereka mempunyai atau berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan sesuai dengan level yang dimilikinya.

1.5.1.2 Metode Analisis Stakeholder

Analisis stakeholder adalah pendekatan ataupun prosedur untuk mencapai sebuah pemahaman sebuah system dengan mengidentifikasi para pihak atau aktor kunci dan untuk menilai kepentingan dari masing-masing dalam kebijakan atau program tersebut. Analisis stakeholder ini dapat bertujuan untuk mengidentifikasi

²⁴ Riskiyah H (2018) Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Puskesmas Di Kabupaten Jember. Skripsi, Universitas Jember, Jember

maupun mengetahui sifat dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh para stakeholder yang terlibat, dan dapat menunjukkan peluang kerjasama yang kemungkinan dapat dikembangkan dimasa yang akan datang²⁵.

Menurut (Byrson, 2004) dan (Reed et al., 2009) untuk mengklasifikasi atau mengkategorikan stakeholder dapat menggunakan matriks pengaruh (*influence*) dan kekuatan (*power*) dengan membedakan stakeholder kedalam beberapa kategori *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *Crowd*. Skor tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang didapatkan masing-masing stakeholder kemudian disandingkan sehingga membentuk koordinat. Selanjutnya koordinat tersebut dipetakan dalam matriks pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) yang terbagi menjadi empat kuadran. Posisi stakeholder dalam kuadran tersebut menggambarkan kategori dan klasifikasi stakeholder sebagaimana menurut (Reed et al., 2009) yaitu:

a. *Key players* (Kekuatan Tinggi, Kepentingan Tinggi)

Merupakan stakeholder yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap sebuah kebijakan atau program

b. *Context setters* (Kekuatan Tinggi, Kepentingan Rendah)

Merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan terhadap implementasi kebijakan sehingga dapat menjadi risiko yang signifikan untuk dipantau.

c. *Subjects* (Kekuatan Rendah, Kepentingan Tinggi)

Merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung sebuah implementasi kebijakan atau program, namun kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Stakeholder ini dapat menjadi berpengaruh jika membentuk aliansi dengan stakeholders lainnya.

²⁵ Riskiyah H (2018) Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Puskesmas Di Kabupaten Jember. Skripsi, Universitas Jember, Jember

d. *Crowds* (Kekuatan Rendah, Kepentingan Rendah)

Merupakan stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.

Dengan adanya stakeholder dalam sebuah pengimplementasian program dalam suatu organisasi atau negara perlu dilakukan sebuah analisis stakeholder. Analisis stakeholder lebih dalam akan menggunakan teknik *power vs interest*. Adapun analisis stakeholder dengan menggunakan *power vs interes* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 6 Stakeholder Analisis (Matrix Mendelow)

		<i>Level of Interest</i>	
		<i>Low</i>	<i>High</i>
<i>Power</i>	<i>Low</i>	Kategori A <i>Minimal Effort</i>	Kategori B <i>Keep Informed</i>
	<i>High</i>	Kategori C <i>Keep Satisfied</i>	Kategori D <i>Key Player</i>

Dalam tabel tersebut menjelaskan terkait dengan posisi yang ditetapkan dalam masing-masing pihak stakeholder dengan melihat melihat Power yang dianggap sebagai potensi dari setiap stakeholder dalam mempengaruhi sebuah kebijakan. Dan interest atau kepentingan dari seorang stakeholder terhadap kebijakan atau program yang dijalankan. Teknik ini dapat digunakan untuk memahami definisi permasalahan sehingga dapat menarik kesimpulan terhadap aksi setiap stakeholder.

1.5.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu komponen dalam sebuah negara yang tidak boleh terabaikan. Negara tanpa adanya sebuah komponen kebijakan publik, maka akan dipandang bahwa negara tersebut gagal, karena kehidupan benegara hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Proses kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan. Kebijakan publik dibuat adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan masyarakatnya.

Ada banyak pendapat yang mendefinisikan sebuah kebijakan. Eyestone (1971:18 dalam (Hayat, 2018)²⁶ berpendapat bahwa kebijakan adalah *the relationship of governmental unit to its environment* (Hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan). Hubungan antar unit-unit dalam lembaga pemerintahan diidentifikasi sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara *top-down*. Setiap pemimpin/atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh bawahan, baik secara kelembagaan atau pun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.

Sementara Wilson mengemukakan bahwa kebijakan merupakan *actions, objective and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*. atau diartikan sebagai (tindakan, objektif dan pernyataan dari pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

²⁶ Hayat, H. (2018). Buku Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy dalam kamus Webster²⁷ dimaknai sebagai : *‘a definitive course or method of action selected (as by a government, institution or individual) from among alternative presents and future decisions’*. Definisi yang terdapat dalam kamus tersebut masih bersifat sangat umum. Dalam konteks studi implementasi yang dibicarakan disini tentu saja kebijakan selalu dikaitkan dengan kepentingan publik, karena “Publik Policy is what publik administration implement”

Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dalam kaitan ini, Dye mengartikan kebijakan publik sebagai *“policy is whatever government choose to do or not to do”*. Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah adalah kebijakan publik. Melakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan tidak membuat keputusan adalah menjadi kebijakan publik . Dalam buku berjudul Publik Policymaking, Anderson (2000) pun setuju dengan pandangan Dye tentang makna kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.

Dalam kesempatan lain, Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan badan-badan pemerintahan. di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: a). Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; b). Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; c) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; d). Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; e). Kebijakan

²⁷ Triana, R. W. (2011). Mengenal Implementasi Kebijakan Publik. In Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: Surabaya : PT Revka Petra Media

pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Lain lagi dengan Edward yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs.”* Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program.

Sementara David Easton mendefinisikan *publik policy* sebagai : *“The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values.”* Maksudnya, *publik policy* tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan

Sementara Hugwood & Gunn berpendapat bahwa kebijakan publik itu terdiri dari 10 definisi²⁸, yaitu:

1. Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*as a label for a field activity*);
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*);
3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (*as specific proposals*)
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*as decision of government*)

²⁸ Hayat, H. (2018). Buku Kebijakan Publik

5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (*as formal authorization*);
6. Kebijakan sebagai program (*as programme*)
7. Kebijakan sebagai keluaran (*as output*)
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (*as outcome*)
9. Kebijakan sebagai suatu teori atau model (*as a theory or model*)
10. Kebijakan sebagai proses (*as process*);

Definisi kebijakan publik yang termasuk dalam sudut pandang ini ialah Easton (1969) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Peran pejabat/aktor-aktor publik sangat dominan.

Sementara Jonnes (1977), memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Kegiatan pemerintah dalam melakukan perubahan suatu kebijakan publik secara bertahap tersebut merupakan suatu tindakan/sikap evaluasi dan reformasi yang dilakukan setelah melihat bagaimana hasilnya di dalam masyarakat. Hal itu dilakukan pemerintah sebagai tindakan untuk memperbaharui kebijakan publik menjadi lebih baik lagi.

Kemudian Chief J.O. Udoji (1981) dalam (Abdoellah, 2016) beranggapan bahwa kebijakan publik sebagai “ *An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.*” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Woll (1966) mengungkapkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas

pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dari berbagai definisi dari kebijakan publik yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah dasar pedoman untuk melakukan tindakan atas suatu aktivitas tertentu yang telah dibuat oleh badan-badan atau pejabat pemerintah dengan menggunakan pedoman tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada publik.

1.5.2.1 Tahapan Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan menurut William N Dumn merupakan sebuah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan pada proses kebijakan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis yang diungkapkan Willian N Dumn dijelaskan sebagai sebuah proses pembuatan kebijakan yang meliputi : 1) Penyusunan agenda, 2) Formulasi kebijakan, 3) Adopsi kebijakan, 4) implementasi kebijakan dan 5) Evaluasi kebijakan (Dunn, 1999). Analisis kebijakan dapat menghasilkan sebuah informasi yang relevan dengan kebijakan pada seluruh tahapan dari proses pembuatan kebijakan²⁹.

Robert S. Mayer dan Ernest Greenwood, 1984 dalam (Triana, 2011) mengatakan bahwa dalam gambaran yang lebih komprehensif, maka langkah – langkah dalam proses penyusunan kebijakan adalah³⁰ :

1. Menentukan tujuan
2. Penilaian kebutuhan
3. Spesifikasi sasaran – sasaran
4. Perencanaan perangkat tindakan alternatif
5. Perkiraan konsekuensi tindakan – tindakan alternatif

²⁹ Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

³⁰ Triana, R. W. (2011). Mengenal Implementasi Kebijakan Publik. In Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: Surabaya : PT Revka Petra Media

6. Pemilihan satu (atau lebih) perangkat tindakan
7. Implementasi tindakan
8. Evaluasi hasil
9. Modifikasi sasaran, tujuan, dan perangkat – perangkat tindakan berdasarkan umpan balik

Berbeda dengan Robert S. Mayer dan Ernest Greenwood, (Abdoellah, 2016) menjelaskan proses kebijakan publik dengan lebih sederhana. Proses kebijakan publik pada dasarnya merupakan sebuah tahap-tahap, yang dimulai dari perumusan, implementasi kebijakan dan sebuah penilaian kebijakan atau evaluasi kebijakan publik. Pada tahap perumusan kebijakan, sebelumnya dilakukan tahapan penyusunan agenda (agenda setting) dan setelah dilakukannya perumusan kebijakan, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan adopsi kebijakan. Kemudian setelah itu baru dilakukan sebuah implementasi kebijakan³¹.

Dari 3 gambaran yang dipaparkan tampak seolah selalu ada langkah – langkah pasti dalam penyusunan kebijakan, yang dimulai dari:

1. Identifikasi adanya masalah atau kebutuhan (publik) yang memerlukan penanganan/ intervensi pemerintah.
2. Penilaian atas masalah/ tujuan tersebut apakah akan masuk menjadi agenda pemerintah atau tidak. Penilaian atas apa yang akan menjadi agenda pemerintah atau, tidak bisa bersifat sangat politis dan juga bisa diwarnai pertarungan memperebutkan pengaruh politik.
3. Penetapan agenda pemerintah untuk menjadi prioritas utama pembangunan.
4. Proses formulasi kebijakan yang berlangsung di tingkat eksekutif dan legislative. Proses ini (seharusnya) berlangsung sangat rasional dalam pemilihan alternatif – alternatif tindakan (Mayer dan Greenwood), atau

³¹ Abdoellah, A. Y. and Y. R. (2016). Teori Dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Rasional terbatas (Herbert A. Simon) karena juga sarat aktifitas politik berupa advokasi, koalisi, negosiasi, ataupun kompromi (Ripley).

5. Legimitasi kebijakan di tingkat legislative, yang di dalamnya terkandung dasar hukum, sasaran – sasaran yang ingin dicapai, sekaligus program – program/ perangkat – perangkat tindakan yang harus dilaksanakan.
6. Implementasi (program) kebijakan.
7. Evaluasi atas hasil implementasi .
8. Umpan balik.

1.5.3 Implementasi Kebijakan Publik

Konsep Implementasi yang berasal dari kerangka teoritik berawal dari sebuah kebijakan yang mana terdapat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi atau bisa disebut juga dengan pelaksanaan sebuah kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan setelah adanya perumusan sebuah kebijakan. Tanpa adanya suatu implementasi, maka sebuah kebijakan yang telah direncanakan dan dirumuskan tidak akan ada artinya. Oleh sebab itu, sebuah implementasi kebijakan publik dikatakan sesuatu yang mempunyai nilai dan kedudukan yang tinggi dalam sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas dan mempunyai sebuah makna dalam pelaksanaan Undang-Undang yang mana didalamnya terdapat berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik kerja sama untuk menjalankan sebuah kebijakan guna meraih tujuan kebijakan ataupun program-program.

George C.Edwards III mendefinisikan bahwa studi implementasi dalam kebijakan adalah suatu hal yang penting dalam publik administration dan publik policy. Implementasi kebijakan merupakan sebuah tahap perumusan kebijakan antara pembentukan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika pada suatu kebijakan berjalan tidak sesuai dan dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut mungkin akan terjadi kegagalan meskipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik.

Sementara itu, Grindle lebih menekankan bahwa tugas dari implementasi adalah untuk membentuk suatu kaitan yang dapat memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Oleh karena itu tugas dari implementasi juga mencakup terbentuknya “*a policy delivery sistem*” yang mana sarana tertentu dirancang sedemikian rupa dan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sabatier & Mazmanian menegaskan bahwa implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum - bisa berbentuk undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dll dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Program – program inilah yang kemudian disusun struktur pengimplementasiannya agar selanjutnya menghasilkan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan yang dimaksud.

Karena implementasi merupakan perwujudan nyata dari (isi/tujuan) kebijakan publik, maka aktifitas-aktifitas implementasi haruslah dilakukan secara cermat. Bahwa memang ada kebijakan yang bersifat *self executed*, yakni yang dapat langsung dilaksanakan, tidaklah mengurangi makna penting dari kecermatan dalam menyusun proses implementasi, sebab dari hasil implementasi tersebut kinerja pemerintah dapat dinilai. Selain itu sebagai bagian dari proses kebijakan, maka dari hasil implementasi kebijakan memperoleh umpan balik, apakah perlu kebijakan direvisi atau tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Sabatier dan Mazmanian:

“The process normally runs through a number of stages beginning with passage the basic statute, followed by policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those outputs, the perceived impacts of agency decisions, an finally important revisions (or attempted revisions) in the basic statute” (1983 : 20).

Ripley dan Franklin mendefinisikan implementasi adalah segala yang yang terjadi setelah adanya undang-undang ang ditetapkan yang memberikan otoritas

program, kebijakn, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis output yang nyata (*tangible output*). Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa didalam implementasi terdapat berbagai macam kegiatan yaitu pertama, badan pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasiyang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Kedua, badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi sebuah arahan konkrit, regulasi, serta rencana-rencana dan deain program. Ketiga, badan pelaksana mengorganisasikan kegiatan dengan cara menciptakan unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Berbeda halnya dengan Van Meter dan Van Horn yang lebih membatasi implementasi kebijakan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana yang disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Terdapat 3 kegiatan utama yang paling krusial dalam implementasi kebijakan, yaitu :

1. Penafsiran, Penafsiran adalah suatu kegiatan yang mengartikan sebuah program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi, merupakan wadah atau unit yang berfungsi untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan, berkaitan dengan perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan, gaji/upah (Hesel, 2002 dalam (Abdoellah, 2016)³².

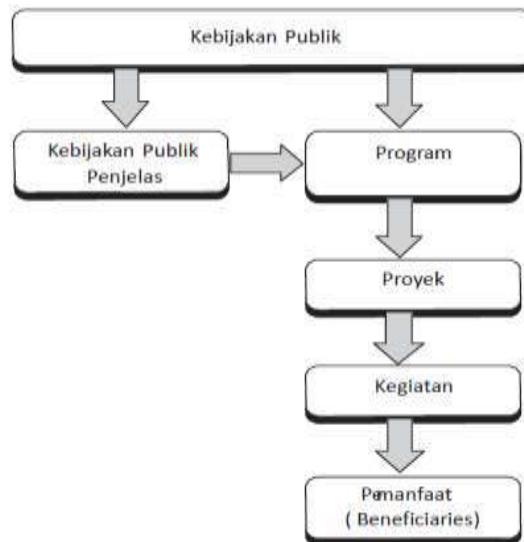
Dari berbagai definisi dari kebijakan publik yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan adalah sebuah proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan yang mana didalamnya menyangkut mengenai tindakan dan

³² Abdoellah, A. Y. and Y. R. (2016). Teori Dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

penyediaan sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan.

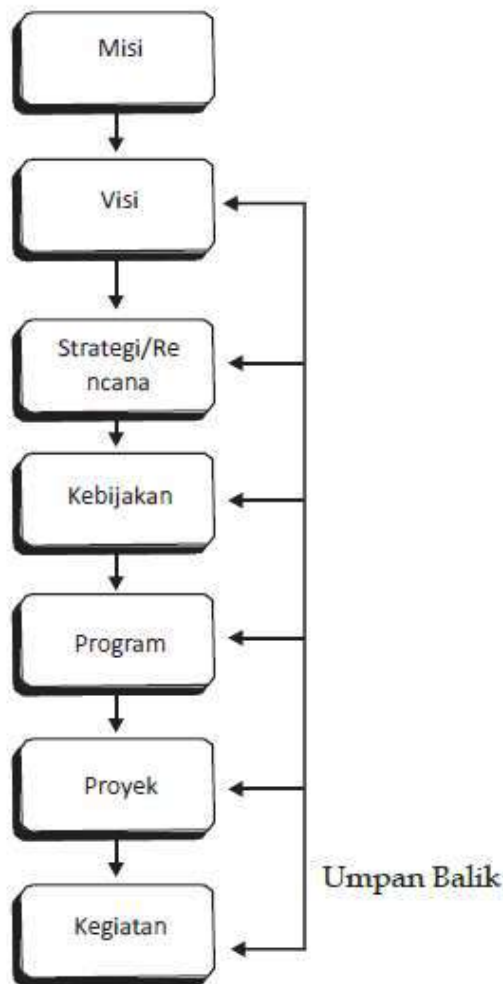
1.5.3.1 Tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dari sebuah kebijakan publik pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk mencapainya. Terdapat dua pilihan dalam sebuah pengimplementasian kebijakan publik, yaitu pertama adalah sebuah implementasi tersebut langsung diarahkan dalam bentuk program. Kedua, dengan turunan dari kebijakan publik yang utama (Handoyo, 2012). Berikut adalah gambar terkait langkah-langkah yang terdapat dalam implementasi kebijakan publik



Gambar 1. 2 Pilihan Pertama Langkah Implementasi Kebijakan Publik

Dengan adanya gambar tersebut, dapat dilihat bahwa pada dasarnya sebuah kebijakan publik akan membutuhkan adanya kebijakan publik penjelas yang nantinya akan ditransfer dalam bentuk program. Kebijakan publik penjelas dapat ditunjukkan dengan peraturan pelaksanaan baik melalui Keputusan presiden, Inpres, Peraturan Menteri, Keputusan yang diambil oleh kepala daerah, keputusan dari kepala dinas yang mana keputusan-keputusan tersebut adalah keputusan yang bersifat langsung. Kemudian langkah dalam implementasi kebijakan dapat dilihat lebih detail dengan melihat gambar berikut :



Gambar 1. 3 langkah 2 Dari Implementasi Kebijakan Publik

Dari gambar diatas, sebuah misi tersebut dapat dikatakan sebagai alasan yang melatar belakangi sebuah organisasi tersebut ada dan misi tersebut akan membawa organisasi agar dapat menentukan visi yang diemban oleh individu yang memimpin organisasi. Sebuah misi akan melekat pada organisasi sedangkan visi akan dibawa oleh pemimpin organisasi. Kemudian dengan adanya misi, dan visi tersebut maka akan muncul sebuah strategi yang mana strategi tersebut merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi tersebut dapat dijelaskan melalui bentuk kebijakan, kebijakan publik inilah yang menjadi keputusan dari adanya strategi. Kemudian dengan adanya kebijakan tersebut selanjutnya akan dijelaskan melalui program-program yang mana program ini akan dirinci dalam berbagai proyek yang kemudian di implementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan atau bisa juga di sebut dengan produk dari sebuah kebijakan publik.

1.5.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam sebuah implementasi kebijakan maka akan ditemukan berbagai versi model, dan dari setiap model tersebut akan memiliki variabel-variabel penentu yang berbeda-beda setiap modelnya. Hal ini dapat terjadi karena pendapat yang disampaikan oleh para ahli didalam setiap teori ataupun model akan berbeda sesuai dengan pemikiran masing-masing, karena cara pandang dan pendefinisian setiap orang tidak mungkin sama seutuhnya dan pasti ada perbedaan yang menjadikan ciri khas terhadap implemmentasi kebijakan. Menurut Wahab 2002 dalam Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfianan 2015, Model diartikan sebagai bentuk penyajian, baik secara abstrak maupun secara operasional, tetapi ada hal yang harus di pahami dengan benar bahwa baik dan buruknya suatu model tersebut akan bergantung pada kompleksitas permasalahan yang ada di dlaam kebijakan yang akan di kaji dan menyangkut juga dengan tujuan analisis atau penelitian itu sendiri. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan terkait dengan analisis stakeholder dalam implementasi kebijakan korporasi petani benih jagung di Kabupaten Tuban ini adalah dengan metode implementasi ekbiajkan yang

dikemukakan oleh Grindle. Yang mana model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle.

Grindle (1980 : 6) bahwa : “*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect*” keberhasilan implementasi ditentukan oleh 2 variabel besar dari kebijakan tersebut, yaitu : *Content* dan *Context*.

Isi Kebijakan (*Content of Policy*), mencakup³³ :

1. Kepentingan yang terpengaruh (*Interest affected*)

Kepentingan yang terpengaruh ini menyangkut sejauh mana kepentingan yang dimiliki oleh kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan Indikator ini memiliki pendapat bahwa dalam implementasi kebijakan pasti memiliki banyak kepentingan yang ada didalamnya dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya.

2. Tipe manfaat (*Type of benefit*)

Tipe manfaat merupakan jenis manfaat yang di terima oleh kelompok sasaran. Dalam konteks sebuah kebijakan, adanya manfaat ini akan menjelaskan bahwa dalam suatu pelaksanaan kebijakan harus termuat beberapa jenis manfaat dan berbagai manfaat ini nantinya akan ditark untuk menghasilkan dampak positif dalam pengimplementasian kebijakan atau program.

3. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of change envisioned*)

Derajat perubahan yang diinginkan merupakan tingkat perubahan yang diinginkan dengan adanya implementasi kebijakan. Seberapa besar perubahan yang akan atau ingin dicapai dalam jangka pendek

³³ Muhaimin MS, Nunik RH, Fitriyah (2022) Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021 . *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2): 349-365

ataupun jangka panjang dengan adanya implementasi kebijakan. Derajat perubahan yang diinginkan ini akan menjadi acuan agar kebijakan tetap berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal.

4. Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*)

Letak pengambilan keputusan ini berbicara terkait ditingkat mana penambilan keputusan kebijakan ini dibuat. Pengambilan keputusan dalam semua implementasi kebijakan akan memegang peranan penting, sehingga harus jelas dimana letak pengambilan keputusan agar tidak menimbulkan kerancuan.

Proses Implementasi Kebijakan Publik

5. Pelaksanaan program (*Program implementor*)

Dalam sebuah implementasi kebijakan pasti terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dan didalam indikator pelaksanaan program inilah para pihak tersebut dijelaskan. Karena di dalam menjalankan sebuah kebijakan atau program harus didukung dengan pelaksana kebijakan yang berkopeten dan memiliki kapabilitas sehingga pelaksanaan program atau kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

6. Sumberdaya yang dikerahkan (*Resources committed*)

Sumber daya yang dikerahkan ini akan melihat kualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. sumber daya yang dikerahkan ini juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebijakan yang diambil dan dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan agar kebijakan atau program dapat dijalankan dengan pihak yang tepat.

Sedangkan yang termasuk dalam Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*), meliputi :

1. Kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat (*power, interest, and strategies of actors involve*)

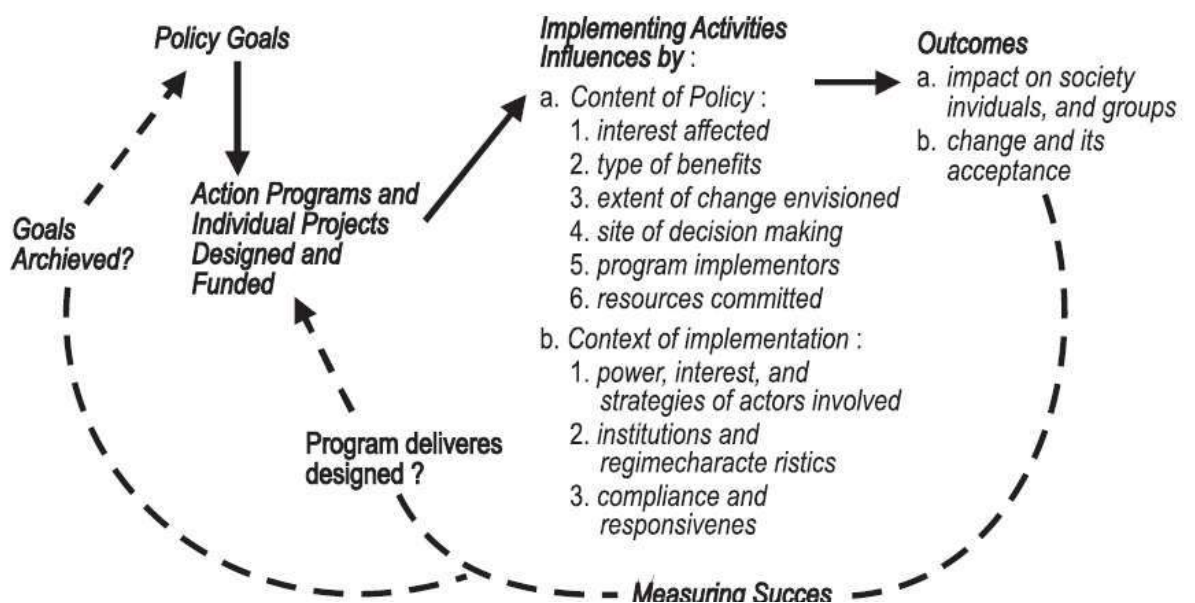
Dalam indikator ini akan menjelaskan bagaimana kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk dapat mengimplemnetasikan kebijakan atau program dengan baik dan tepat .

2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*)

Ada indikator ini menjelaskan bagaimana keberadaan lembaga atau penguasa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Karakteristik dari lembaga dalam menjalani kebijakan, menyikapi permasalahan, dan katakarakteristik lainnya juga turut mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan,

3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiviness*)

Kepatuhan dan daya tangkap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan juga merupakan sebuah indicator yang pentng dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya respon yang cepat dan tepat makan hal tersebut akan mempengaruhi efektifitas sebuah kebijakan dijalankan .



Bagan 1. 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Maka dapat disimpulkan dari 5 model implementasi yang telah di jelaskan diatas, model yang cocok untuk dipergunakan dalam penelitian implementasi kebijakan pengembangan budidaya jagung dengan studi tentang implementasi kebijakan pengembangan jagung di Kabupaten Tuban melalui program korporasi petani adalah model implementasi yang terakhir yaitu yang dikemukakan oleh Grindle

1.5.4 Kebijakan Korporasi Petani Benih Jagung

Kebijakan korporasi petani benih jagung merupakan sebuah kegiatan perbenihan jagung hibrida dengan berbasis korporasi petani yang semula merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Petanian. . Korporasi Petani (*Corporate farming*) adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan pada masing-masing petani, sehingga efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya dapat dicapai³⁴. Tujuan jangka panjang pengembangan *corporate farming* adalah mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi. Pendekatan dalam pengembangannya adalah pembangunan pedesaan berbasis agribisnis dengan memanfaatkan peluang sumberdaya dan kelembagaan masyarakat secara optimal

Awalnya kegiatan ini dicanangkan oleh Kementerian Pertanian untuk di terapkan pada daerah yang potensial seperti di Kabupaten Tuban. Konsep yang diterapkan dalam kebijakan korporasi ini adalah pengembangan daya saing produk melalui pengelolaan hulu hilir sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi peningkatan taraf hidup

³⁴ Musthofa, I., & Kurnia, G. (2018). Prospek Penerapan Sistem Corporate Farming. Jurnal Agriseip, 16(1), 11–22

petani. Benih jagung hibrida yang diimplementasikan dan dikembangkan di Kabupaten Tuban merupakan hasil dari rakitan dari anak bangsa, yang artinya dalam pengembangan benih jagung ini Indonesia sudah mengarahkan untuk lebih mandiri. Ini juga merupakan strategi dari pemerintah dalam upaya untuk menekan benih jagung import dan mengelola hasil karya anak bangsa. Dengan adanya kegiatan pengembangan jagung hibrida berbasis korporasi ini, diharapkan dapat mendorong petani untuk mengelola usaha taninya secara professional melalui penguatan kelembagaan

Pengimplementasian kebijakan korporasi petani benih jagung di Kabupaten Tuban berfokus pada 1 lokasi yaitu di Kecamatan Jatirogo, hal ini dikarenakan dalam lokasi perbenihan ini tidak boleh terkontaminasi dengan jenis jagung lain, yang digunakan untuk perbenihan ini adalah jagung hibrida. Jika dalam penanaman jagung disuatu wilayah terkontaminasi dengan jenis jagung lain, maka akan menimbulkan kegagalan. Oleh karena itu kerjasama antar petani sangat dipegang kuat. Karena jika 1 saja petani yang tidak melakukan sesuai procedural yang disepakati, maka semua akan merasakan dampaknya.

Dibalik beberapa strategi yang dilakukan tersebut, pasti ada manfaat yang di dapat oleh masyarakat setempat dan khususnya para petani ketika telah mampu memproduksi benih jagung dengan baik dan benar. Dikembangkannya bibit jagung hibrida secara mandiri tersebut, saat ini petani di Kabupaten Tuban bisa memenuhi kebutuhan bibit jagung sendiri dengan harga yang lebih murah³⁵. Selain itu produksi bibit jagung hibrida berbasis korporasi ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi petani, karena jagung yang digunakan untuk bibit harganya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan produksi jagung konsumsi. Oleh karena itu, secara bertahap hal ini juga akan memberikan pengaruhnya terhadap

³⁵ Imron, A. (2020). Tuban jadi Kabupaten Pertama di Indonesia Ekspor Benih Jagung

peningkatan ekonomi masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan bersama.

1.6 Definisi Konsep

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan, maka untuk mempermudah mengenai pemahaman konsep yang terdapat dalam penelitian ini, penulis menyusun pengertian atau biasa disebut dengan definisi konsep, sebagai berikut :

1. Stakeholder

Stakeholder merupakan suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki kepentingan dan dipengaruhi oleh isu strategis/masalah kebijakan yang berkembang, termasuk pula pihak yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi sebuah isu maupun masalah.

2. Analisis Stakeholder

Analisis stakeholder adalah proses mengidentifikasi suatu perusahaan atau organisasi yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tindakan yang akan dilakukan lalu dikelompokkan dengan dampak dari tindakan yang dilakukan. Informasi yang ada akan digunakan untuk evaluasi agar ada tindakan preventif dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan yang mana didalamnya menyangkut mengenai tindakan dan penyediaan sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan.

4. Kebijakan korporasi benih jagung

Kebijakan korporasi petani benih jagung adalah suatu kebijakan yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengembangkan potensi yang ada yaitu hasil produksi jagung, yang mana kebijakan ini dijalankan oleh beberapa kelompok tani yang ada di Kabupaten

Tuban dan membentuk sebuah korporasi dan tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional

5. Korporasi petani

Korporasi petani diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan pada masing-masing petani, sehingga efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya dapat dicapai.

1.7 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memahami objek ilmu yang bersangkutan. Oleh karena itu, di dalam sebuah penelitian kehadiran metode menjadi sangat mutlak. Metode penelitian juga dapat diartikan dengan keseluruhan proses berpikir yang diawali dengan perumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kemudian dijelaskan kerangka teori tertentu dan setelahnya dilakukan pengumpulan data dan uji empiris sampai pada penjelasan dan penarikan kesimpulan atas fenomena sosial yang diteliti³⁶.

Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai implementasi kebijakan pengembangan budidaya jagung dengan studi tentang strategi korporasi petani benih jagung di Kabupaten Tuban menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan pada saat melakukan eksplorasi dan pemahaman makna yang berasal dari masalah sosial ataupun masalah kemanusiaan. Prosedur dalam metode penelitian kualitatif menitik beratkan pada data yang dikemas dalam bentuk teks dan gambar-gambar yang memiliki analisis data dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-

³⁶ Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Belajar

beda. Metode penelitian kualitatif mempunyai sifat-sifat khas yaitu menekankan pada lingkungan yang alami (*naturalistic setting*), induktif, fleksibel, pengalaman secara langsung (*direct experience*), keseluruhan (*wholeness*), adanya partisipasi yang aktif daripada partisipan dan penafsiran (*interpretation*)³⁷

Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki oleh metode kualitatif, diantaranya :

- a. Data yang diperoleh sangat mendasar karena data yang dibawa berdasarkan fakta, realita suatu peristiwa dan bukan sesuatu yang sengaja dibuat oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti terjun kelapangan dengan pikiran yang murni tanpa ada gambaran hasil dari penelitian yang akan diteliti.
- b. Pembahasan didalamnya terpusat, hal ini dikarenakan dalam metode kualitatif pencarian data dilakukan secara mendalam
- c. Pandangan atau gagasan dan informasi dari informan bersifat terbuka, jadi informasi tidak hanya berasal dari satu informan saja. Informasi yang diberikan oleh informan akan menjadi masukan yang kemudian diolah sehingga dapat menjadi rujukan utama dalam proses analisis data.
- d. Memiliki sifat yang realistis. Dalam metode penelitian ini, peneliti emyakini bahwa adanya sebuah perkembangan dari waktu ke waktu sehingga peneliti tau bahwa semuanya bisa berubah

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang dilihat dari sudut pandang subjek penelitian yang dilakukan secara deskriptif yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dan komprehensif

1.7.1 Tipe Penelitian

³⁷ Raco, J. . (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (A. L.dan J. B. Soedarmanta, Ed.). Jakarta: PT. Grasindo.

Dapat dilihat dari obyek dan metode analisis yang telah digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk mendeskripsikan gambaran dari fenomena sosial yang terjadi sesungguhnya tidak hanya dari faktor normative saja. Pada implementasi kebijakan korporasi petani benih jagung yang dinilai menggunakan analisis stakeholder. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan status dari obyek penelitian ketika penelitian tersebut dilaksanakan atau dapat pula disebut untuk memberikan informasi mengenai keadaan yang senyatanya.

Dalam penelitian ini, tipe penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengembangan budidaya jagung dengan studi tentang strategi korporasi petani benih jagung di Kabupaten Tuban

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana seorang peneliti dapat menemui informan yang nantinya akan memberikan informasi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu pada Kabupaten Tuban tepatnya untuk daerah Kecamatan Jatirogo sebagai awal mula kebijakan korporasi petani benih jagung digagas. Alasan pemilihan lokasi penelitian pada penelitian ini dikarenakan kebijakan korporasi petani benih jagung ini pertama kali dicanangkan oleh Kementerian Pertanian yang menunjuk kota Tuban sebagai pilot project dalam pengembangan benih jagung berbasis korporasi yang kemudian diimplementasikan di Kecamatan Jatirogo dengan dibantu lembaga terkait. Kecamatan jatirogo dipilih karena kondisi tanah, angin, cuaca dan air terbilang cukup bagus dan sesuai jika ditanami jagung perbenihan. Ditambah lagi Kecamatan Jatirogo memiliki sumber daya manusia dari petani yang mendukung.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang bersifat kualitatif. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya berbagai informasi yang harus diperoleh dari berbagai pihak yang relevan dengan penelitian maka akan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur *purposive*, yang mana *purposive* merupakan cara menentukan kelompok peserta yang akan menjadi informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan pihak yang paling mengerti dan memahami tentang permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Teknik penentuan informan dengan *purposive* ini dinilai lebih mampu untuk mendapatkan kelengkapan data dalam menghadapi keadaan yang sebenarnya yang ternyata tidak tunggal³⁸. *Purposive* dalam penelitian ini melihat dari jumlah keterlibatan aparat dalam pengimplementasian kebijakan korporasi petani benih jagung yang ada di Tuban.

Tujuan dari adanya *purposive* yang digunakan dalam penentuan informan ada penelitian ini adalah untuk memperluas deskripsi informasi dan untuk mengetahui dan mengulik lebih dalam dan detail mengenai strategi dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam pengoptimalisasian implemementasi kebijakan korporasi petani benih jagung di Kabupaten Tuban. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data maupun informasi yang komprehensif dan relevan serta akurat, pengumpulan data yang utama dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan yang bertanggung jawab dan memahami secara penuh kepada informan yang dapat dimintai pertanggung jawaban terkait strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan korporasi petani benih jagung. Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 12 yaitu :

³⁸ Nugraha, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta

1. Ibu Ulfah selaku kepala seksi Penggunaan dan Pengawasan Saana Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Tahun 2022
2. Ibu Ayu selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Bencana Pertanian, yang dulunya menjabat sebagai kepala seksi Penggunaan dan Pengawasan Saana Pertanian dan mengangani korporasi dari tahun 2019 -2021 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban
3. Ibu Feri selaku Koordinator Penyuluh dari BPP Kecamatan Jatirogo
4. Pak Edwin selaku petugas lapangan dari PT. Tunas Widji Inti Nayyotama (TWINN)
5. Pak Jefri selaku *quality control* dari PT. Tunas Widji Inti Nayyotama (TWINN)
6. Pak Narso selaku petugas lapangan PT. Tunas Widji Inti Nayyotama (TWINN)
7. Pak Arya selaku petugas marketing dari Koperasi Firma Tani Nusantara
8. Pak Radi selaku ketua kelompok tani Kecamatan Jatirogo
9. Pak Sutahar selaku petani Kecamatan Jatirogo
10. Pak Nawawi selaku petani Kecamatan Jatirogo
11. Pak Kusnadi selaku petani Kecamatan Jatirogo
12. Pak Janadi selaku petani Kecamatan Jatirogo

1.7.4 Teknik pengumpulan Data

Data adalah bagian yang paling penting dan sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, dengan adanya data maka peneliti akan dapat mengetahui dengan jelas dan langsung terkait dengan fenomena sosial yang terjadi dilapangan. Langkah-langkah yang digunakan untuk pengumpulan data menurut John W. Creswell, yaitu terdapat usaha yang membatasi penelitian, mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, kemudian bisa juga

mengumpulkan data melalui dokumentasi-dokumentasi, materi-materi visual, dan beberapa usaha untuk mencatat atau merekam informasi dari informan³⁹.

Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang didapat dari sumber-sumber primer, seperti data yang asli dan senyatanya, informasi yang didapatkan dari orang pertama atau yang secara langsung dari informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari sumber secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis seperti literature dan laporan-laporan yang relevan dan komprehensif dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu strategi pengumpulan data yang termasuk didalam jenis pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan demi mendapatkan informasi yang tidak di dapat dari kegiatan observasi. Tidak semua data bisa diperoleh dengan observasi, maka dari itu peneliti harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dalam bentuk wawancara. Dalam wawancara kualitatif, peneliti akan melakukan kegiatan wawancara secara tatap muka (*face to face*), melakukan wawancara kepada informan dengan menggunakan telepon, dengan fokus group atau melakukan wawancara kepada informan yang berada dalam sebuah kelompok yang mana dalam 1 kelompok terdiri dari enam sampai delapan informan, dan dapat juga mengumpulkan data menggunakan internet yaitu lewat email atau melalui media sosial lainnya.

Wawancara ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan baik yang tidak terstruktur (unstructured) dan umumnya yang bersifat terbuka (open-ended) yang ditujukan untuk dapat memperoleh pendapat dan pandangan dari para informan terkait fenomena sosial yang ditanyakan. Dalam kegiatan

³⁹ Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Belajar

wawancara, peneliti tidak hanya sekedar mengajukan pertanyaan, tetapi juga akan mendapatkan arti dari pengalaman hidup yang orang lain rasakan. Pengalaman beserta pandangan yang diberikan oleh informan inilah yang kemudian dijadikan bahan dasar sebuah data yang akan dianalisis

2. Studi Dokumen

Menurut Yin, 2020 dalam (Nugraha, 2014), menyebut kegiatan dalam menganalisis data melalui dokumen adalah *content analysis*, karena dalam proses penelitian tugas seorang peneliti bukan hanya sekedar mencatat informasi penting yang terdapat di dalam dokumen, tetapi juga harus mampu memahami secara kritis dan teliti mengenai makna yang terkandung didalam dokumen tersebut⁴⁰. Dibandingkan dengan teknik pengambilan data yang lain, studi dokumen dikategorikan mudah, karena peneliti hanya menyusun informasi yang didapatnya dari memilah-milah data yang valid, relevan dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

Selama proses penelitian, peneliti akan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen kualitatif baik dokumen yang berupa dokumen publik maupun dokumen yang bersifat privat. Dokumen publik dapat berupa laporan resmi dari dinas terkait, makalah, surat kabar sedangkan dokumen privat dapat berupa jurnal milik pribadi, buku harian, diary, surat dan e-mail

Dalam penelitian ini, dokumen yang telah dikumpulkan oleh penulis yaitu antara lain

1. Rencanna Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur
2. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024
3. Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2020

⁴⁰ Nugraha, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta

4. Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2022
 5. Tuban Dalam Angka 2020
 6. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban 2016-2021
 7. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban 2021 - 2026
3. Materi Audio dan Visual

Pengumpulan data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengambilan data melalui video, foto, ataupun bentuk suara apapun. Peneliti melakukan pengambilan gambar dan perekaman suara yang dilakukan ketika sedang pengamatan dan wawancara. Hal ini dilakukan karena untuk menambah kredibilitas penelitian yang akan dilampirkan

1.7.5 Teknik Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data atau validitas dan reabilitas data merupakan pemeriksaan akurasi hasil penelitian dengan prosedur tertentu yang kemudian mengindikasikan konsistensi pendekatan yang digunakan jika diterapkan.

Pada penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi (*triangulate*). Metode triangulasi merupakan teknik memeriksa bukti yang berasal dari sumber yang berbeda-beda lalu menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren di mana jika tema-tema yang dibangun tersebut sejalan dengan perspektif partisipan maka dapat menambah validitas penelitian⁴¹

Alasan menggunakan triangulasi adalah dikarenakan tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang paling cocok dan benar benar sempurna tanpa ada kurang suatu apapun, maka dari itu dalam pengumpulan data peneliti

⁴¹ Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Belajar

membutuhkan lebih dari satu cara perolehan data baik itu melalui wawancara, observasi, studi dokumen dan lainnya.

Dalam penerapan metode triangulasi dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan menggabungkan cara pengambilan data melalui wawancara kepada kelompok tadi sebagai aktor korporasi, dan dari pihak pemerintah, kemudian melakukan observasi pada lokasi penelitian, dan mengumpulkan data melalui studi dokumen dan audiovisual.

1.7.6 Teknik Analisis data

Analisis data kualitatif adalah sebuah analisa yang digunakan untuk mencari hubungan dari sumber data. Hal ini dilakukan untuk untuk menjawab hipotesis dan kemudian nantinya akan dijelaskan secara deskriptif. Analisis data dalam metode penelitian ini berarti mengatur secara sistematis hasil dari sebuah wawancara dan observasi, memahami dan menghasilkan sebuah pemikiran, pendapat dan gagasan baru. Hal ini lah yang disebut dengan *finding* atau dalam metode kualitatif berarti mencari dan menemukan sebuah tema, kondep, pola, dan pengetahuan⁴²

Menurut Patton, 1986 dalam (Nugraha, 2014) mengartikan bahwa analisis data merupakan proses yang mengatur urutan data dan menspesifikasikannya kedalam suatu kategori dan uraian . Patton membagi tuganya menjadi 3 bagian, yaitu memaknai hasil analisis yang dilakukan, menjelaskan dan menjabarkan pola uraian, dan mencari adanya hubungan diantara berbagai uraian didalamnya⁴³. Hampir samadengan yang di katakana oleh Patton, Bogdan dan Taylor (1975) ikut mendeskripsikan analisis data merupakan proses yang digunakan untuk emnemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja. Dalam analisis data ini, menyangkut beberapa proses terkait, yaitu menspesifikasikan

⁴² Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (A. L. dan J. B. Soedarmanta, Ed.). Jakarta: PT. Grasindo

⁴³ Nugraha, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta

data kedalam sebuah pola, kategori dan satuan uraian dasar yang mana dengan kegiatan tersebut dapat menemukan tema. Mengingat bahwa prinsip utama dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan teori dari data.

Untuk memperoleh kesistematiskan dalam analisis data yang dilakukan secara kualitatif maka tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data ini dilakukan dengan cara merangkum dan memilih pokok bahasan dan juga berfokus terhadap sesuatu yang dirasa penting. Dalam reduksi data ini, seorang penulis akan memilih beberapa data kemudian data tersebut disederhanakan, serta mentransformasikan data yang masih kasar yang diperoleh dari lapangan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses mereduksi data sehingga penulis mendapatkan rangkuman dari beberapa data sehingga data yang dianggap tidak wajib untuk dimasukkan dapat tersaring

2. Penyajian data

Pada tahap penyajian data ini, data-data yang diperoleh diuraikan terlebih dahulu dengan penjelasan naratif, namun ada juga di beberapa penelitian kualitatif yang mana dijelaskan dengan grafik, bentuk matriks, gambar, ataupun bagan-bagan. Dari penjelasan ini bertujuan untuk menggabungkan semua informasi yang didapatkan agar terlihat rapi dan tertata dengan baik sehingga dengan demikian penulis dapat mengetahui hal-hal yang terjadi di lapangan dan penulis dapat menentukan apakah menarik kesimpulan adalah langkah yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam teknik analisis data, di mana dalam tahap ini peneliti akan membuat kesimpulan dari semua data yang diperoleh dari lapangan dan berbagai data pendukung lainnya. Kesimpulan yang dilakukan penulis pada awalnya masih belum bersifat permanen atau bisa dibilang masih sementara karena kesimpulan ini masih dapat diubah jika suatu saat ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang dapat memengaruhi penelitian. Namun ketika sebuah kesimpulan yang dipaparkan

di awal telah didukung dengan bukti yang akurat, valid dan terdapat adanya konsistensi yang digambarkan oleh peneliti ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mencari data selanjutnya, maka sebuah kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel.